

KANIBALISME PARTAI POLITIK ISLAM DI KOTA SURABAYA PADA PEMILU 2014

Firdaus Ayu Palestina

Democracy and Regional Institute Studies Surabaya
firdapalestine47@gmail.com

Abstract

The focus of this paper is the phenomenon of the decline of votes at every election as well as the causes of cannibalism that occurred between Islamic parties in the 2014 elections. In this thesis uses qualitative research with descriptive research method. The results of this thesis study is known that the cause of the decline of Islamic party; Fusion and the history that accompanied political parties. Factors Islamic party of the less successful "galvanize" the militant cadres and their capability. Factors party candidates who left the party's vision and sacred mission to make it do a black campaign. Meanwhile, related to the causes of the phenomenon of cannibalism politics here the results obtained three factors, namely: common denominator mass base traditionalists who owned each Islamic party, the factor of voter behavior is dominated by rational voters, a factor difference programs in every region of the election, and the last factor was unclear who owned the principle of Islamic parties.

Keywords: Cannibalism Politics, Islamic political party

Abstrak

Fokus artikel ini adalah mengenai fenomena menurunnya perolehan suara serta faktor penyebab kanibalisme yang terjadi antar partai Islam dalam pemilu 2014. metode kualitatif interpretive digunakan dalam penelitian. Hasil kajian diketahui bahwa penyebab penurunan suara partai Islam adalah pertama, Fusi parpol dan sejarah yang mengirinya. Kedua, Faktor partai Islam yang kurang berhasil "menggembleng" kader menjadi kader yang militan dan berkapabilitas. Ketiga, Kandidat partai yang meninggalkan visi-misi sakral partai sehingga membuatnya melakukan kampanye hitam, Sedangkan terkait dengan penyebab kanibalisme politik terdapat tiga faktor, yaitu: pertama, faktor kesamaan basis massa tradisional yang dimiliki masing-masing partai Islam, Kedua, faktor perilaku pemilih yang didominasi oleh pemilih rasional dan perbedaan program di tiap wilayah pemilu, serta ketiga, adalah tidak jelasnya asas yang dimiliki partai Islam publik.

Kata kunci: Kanibalisme Politik, Partai Politik Islam

Pendahuluan

Dinamika perpolitikan di Indonesia selalu menjadi suatu kajian yang menarik untuk dianalisis perkembangannya. Salah satu hal yang menarik adalah proses pemilu di Indonesia. Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi namun hingga saat ini masih dikategorikan dalam tahap transisi. Dibutuhkan usaha yang tidak mudah untuk dapat beralih dari tahap transisi menuju demokrasi yang hakiki. Salah satunya adalah dengan memberi ruang yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk ikut andil dalam proses demokrasi tersebut. Menurut Diamond (Diamond, 2013: 4) terdapat sepuluh komponen dalam demokrasi, yang salah satunya adalah kebebasan untuk membentuk partai politik dan mengikuti pemilu.

Implikasi dari kebebasan dalam membentuk partai politik ini berdampak pada terjadinya sistem multi partai di Indonesia. Indonesia mengadakan pemilu pertama kali yakni pada tahun 1955 sampai tahun 2014. Dalam keanekaragaman sistem multipartai tersebut, partai politik Islam tidak ketinggalan turut meramaikan pesta demokrasi, namun ironisnya meskipun sebagian besar bangsa Indonesia merupakan penganut muslim, namun pada kenyataannya hingga kini belum mampu membawa partai politik Islam tersebut berkuasa memenangkan pemilu. pada perolehan 5 besar pemilu 2014 di Jawa Timur partai Islam hanya mampu bertahan pada posisi ke 5, yakni PKB, yang oleh karena itu, untuk wilayah Jawa Timur dan kota Surabaya berhasil mendapatkan jatah kursi di DPRD Tingkat I (Provinsi Jawa Timur) sebanyak 20 kursi, sedangkan di DPRD tingkat II (kota Surabaya) sebanyak 5 kursi. Sedangkan PAN (7,59%) untuk DPRD tingkat I memperoleh 7 kursi, sedangkan DPRD tingkat II mendapat jatah 4 kursi. PKS (6,79%) untuk DPRD tingkat I mendapat 6 kursi dan DPRD tingkat II mendapat jatah 5 kursi, dan PPP (6,53%) untuk DPRD tingkat I mendapat 5 kursi, sedangkan DPRD tingkat II mendapat jatah 1 kursi. Parahnya

PBB berada pada posisi rendah dan gagal memperoleh kursi, baik di DPRD tingkat I ataupun II, karena hanya memperoleh suara sebanyak 1,46%.¹

Naik turunnya perolehan suara partai Islam akibat kesamaan misi “partai Islam” ini dapat disebut juga sebagai peristiwa fenomena saling mangsa-memangsa suara atau “kanibalisme dalam politik”. Adapun pengertian kanibalisme politik menurut Amich Alhumami (Alhumami, 2014) seorang antropolog, peneliti senior lembaga studi pengembangan etika usaha (LSPEU) Indonesia, menyatakan bahwa *political cannibalism* atau kanibalisme politik adalah praktik saling memangsa di antara aktor-aktor politik dalam perebutan sumber daya ekonomi-politik, untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau pertarungan merebut kekuasaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik-turun perolehan suara di tiap-tiap pemilu? diantaranya adalah: *Pertama*, karena elektabilitas partai politik Islam yang dinilai rendah oleh masyarakat dan dinilai partai-partai Islam pada kenyataannya juga banyak yang tersandung kasus-kasus asusila dan internal partai, seperti: PKS dengan kasus suap daging Import oleh Lutfi Hasan Ishaq dan kasus perempuan oleh Fathonah, PPP dengan kasus korupsi dana Haji oleh Surya Dharma Ali dan perpecahan yang terjadi karena perbedaan paham antara Surya Dharma Ali dan M. Romahurmuziy yang mengakibatkan saling pecat- memecat antara keduanya, serta PKB dengan perpecahannya antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. *Kedua*, adanya indikasi “perebutan” suara dari masing-masing parpol Islam dikarenakan basis massa yang sama dari masing-masing parpol Islam. Seperti misalnya: PPP dan PKB yang sama-sama memiliki basis massa dari kaum Islam tradisional dan sebagian besar diantaranya merupakan anggota dari organisasi masyarakat Islam Nadhlatul Ulama (NU), serta PAN dan PKS yang

¹Hasil observasi penulis dengan masing-masing lima partai politik Islam, DPW PBB, PAN, PKS, PPP, dan PKB, November 2014

memiliki basis massa dari kaum Modernis dan sebagian besar diantaranya merupakan anggota dari organisasi masyarakat islam Muhammadiyah. Kesamaan basis massa dari masing-masing parpol Islam ini dikarenakan menurut Saiful Mujani, (Biyanto, 2014) partai Islam dapat dibagi menjadi dua. Pertama, partai yang berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman, seperti PKB dan PAN. Kedua, partai yang secara eksplisit berplatform Islam sebagai asas ideologi, seperti PKS, PPP, dan PBB.

Berdasarkan hal tersebut di atas menarik untuk dikaji mengenai bagaimana fenomena “kanibalisme” atau saling makan-memakan suara antar parpol Islam di kota Surabaya pada pemilu 2014, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi fenomena kanibalisme tersebut. Lebih khusus penelitian ini hendak mengkaji lima partai politik Islam di kota Surabaya yang hingga pemilu 2014 yaitu : PAN, PPP, PKB, PKS, dan PBB.

Penyebab Penurunan Suara Partai Politik Islam

Menurunnya suara partai Islam dari awal pemilu hingga pemilu 2014 dan gagalnya partai Islam menjadi partai penentu di tiap pemilu seakan menambah miris kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam hingga kini belum mampu menaruh dan mempercayakan pilihan politiknya pada partai Islam untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Padahal, jika dilihat dari tujuan sejarah berdirinya, partai Islam harusnya mampu mengakomodir mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Tujuan ini menurut Sudarno Shobron (Shobron, 2013: 1) adalah : *Pertama*, umat Islam yang jumlahnya besar di Indonesia ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya. *Kedua*, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik, dengan tidak meninggalkan jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki kekuasaan, maka dengan mudah untuk melakukan dakwah amar makruf nahi

munkar melalui undang-undang resmi negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda) dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat masyarakat. *Ketiga*, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga, maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah. *Keempat*, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu *rahmatan lil'alamien*, hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang langsung dinikmati oleh masyarakat. *Kelima*, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam, dengan penampilan dan pemaknaan yang baru. *Keenam*, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidiq, amanah, tabligh dan fathanah. Dalam bahasa hadis, seorang pemimpin itu harus *dhabid* (cerdas) dan *ghairu syadz* (tidak cacat moral).

Menurut Reslawati, (Reslawati, 2010 : 34) Menyatakan bahwa penyebab penurunan perolehan suara partai politik islam antara lain: parpol islam saat ini sangat pragmatis, tidak ideologis, Ada keinginan parpol islam bergabung menjadi satu atau dua parpol Islam saja atau cukup mengosentrasikan pada parpol islam yang sudah ada dan lolos *elektoral threshold* (ambang batas), agar potensi dan kosentrasi umat tidak terpecah belah, adanya signifikasi yang cukup tajam antara perolehan penurunan suara parpol Islam dengan pengambilan keputusan parpol islam di legislative, bila perolehan suara parpol Islam kecil, maka secara otomatis jumlah wakil parpol islam di legislatif juga kecil.

Tidak jauh berbeda dengan realita yang terjadi di lapangan dan berdasarkan penelitian Shobron dan Reslawati di atas diakui benar terjadi pada kader-kader partai Islam saat ini. Setidaknya menurut Shidiq Baihaqi, selaku sekretaris PKS menyatakan bahwa sedikitnya terdapat lima faktor penyebab menurunnya perolehan suara partai Islam, yaitu :

“Pertama, Tipologi umat Islam yang khas➔ Mayoritas masyarakat Indonesia Islam tetapi tidak otomatis mengkategorikan

dirinya untuk memilih partai islam, karena memang Islam masuk ke Indonesia dalam beberapa pintu, seperti : politik, ekonomi dan budaya. Ini yang nantinya membentuk umat Islam tersebut sebagai Islam kultural/budaya, atau malah dari segi ekonomi saja. (*Islam YES, partai Islam NO*). Kedua, Lunturnya ideologi aliran ➔ Kalau dulu yang komunis milih PKI, kaum abangan dan priyayi milih Nasionalis, dan yang santri milihnya kalau tidak Masyumi ya NU, terus begitu. Namun sekarang ideologi aliran tersebut semakin longgar, karena banyak yang dari PDI-P dan Golkar yang *jilaban*, banyak yang Islamnya kuat dari HMI, PMII, IMM, dll juga milih Golkar sebagai pilihan partainya. Ketiga, Partai Islam terkesan membatasi segmen ➔ Meskipun partai Islam menyatakan diri sebagai partai terbuka, namun secara aplikasi tetap saja belum bisa meluaskan sayap. Terutama kasus di PBB, dia belum bisa mengambil suara diluar pemilih tradisionalnya. PPP juga meskipun secara terbuka menyatakan sebagai partai terbuka tapi tetap segmentasinya khusus. Partai Islam gagal menggerakkan dirinya bergerak ke tengah. Di saat partai nasionalis berhasil mengambil suara Muslim (santri), namun partai Islam masih sulit mengambil suara dari non-santri (Islam). Ini terutama dialami oleh PKS, PPP, dan PBB. Keempat, Capaian kinerja partai-partai Islam tidak bagus ➔ Orang PKB dikatakan lebih cerdas dari orang Golkar itu tidak, orang PKS dikatakan lebih mampu mengelola manajerial dari PDI-P itu juga tidak, dan sayangnya lagi baik secara moral partai Islam pun juga tidak jauh lebih baik dari partai nasionalis, masih banyak dari kalangan (oknum) pemuka agama/kyai yang mau korupsi, dan sebagainya. Kelima, Pengalaman politik partai Islam masih kalah jauh ➔ Secara manajerial juga masih kalah modal dari partai nasionalis, akses media juga kalah jauh (Golkar, Nasdem, Hanura punya media sedangkan partai kita tidak) jika di PKS kita mengikrarkan diri sebagai partai Islam, tapi untuk mengimplementasi teori ideal keislaman dalam praktik politik itu juga masih sulit, kami masih belajar untuk itu. Karena kami punya idealisme, misalnya: masyarakat menuntut kita untuk menghargai budaya (*onok dangdutane, jogetan, dll*) kita masih belum mampu menyadarkan masyarakat akan itu". (Baihaqi, *Wawancara*, 23 Desember 2014)

Suwasis Hadi, selaku Sekretaris DPW PAN mengkatogerikan menurunnya suara partai Islam dalam pemilu itu karena partai Islam tidak berhasilnya menjalankan tiga hal yaitu: faktor pengurus, militansi program, dan program kerja.

Menurut saya mengapa perolehan suara partai Islam itu selalu menurun karena partai Islam sendiri belum mampu melaksanakan tiga hal, *Pertama*, Faktor pengurus : Para pengurus partai Islam belum mampu mencari tokoh yang mempunyai pengaruh kuat, yang memiliki jaringan kuat di wilayah tersebut. *Kedua*, Militansi program, Partai kurang bersungguh-sungguh untuk mengurus kader, dalam artian mencari massa yang benar-benar militan. *Ketiga*, Program kerja, Program-program partai kurang bisa menawarkan program yang kena di hati rakyat. PAN juga dengan jargonnya “PAN MERAKYAT”, tapi pada kenyataannya juga belum mampu merangkul rakyat kecil. (Hadi, *Wawancara*, 08 Januari 2015)

“Kegalauan” dari Kuswiyanto tentang rendahnya kualitas kader dari partai Islam memang tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang ringan. Bagaimanapun kader merupakan aktor penting yang nantinya akan sangat berpengaruh jika kader tersebut memenangkan pemilu dan maju menjadi legislatif menjadi wakil rakyat. Jika kadernya “mlempem”, bagaimana dengan kebijakan yang akan diambilnya nanti?. Rizal Aminuddin selaku Sekretaris DPW PBB, menyatakan bahwa “Kebanyakan kandidat (caleg) dalam menawarkan programnya tidak seide dengan partai.” (Aminuddin, *Wawancara*, 6 Desember 2014). Partai tentu telah memiliki visi-misi yang telah tersusun dengan baik sesuai dengan tujuan partai dan kebutuhan masyarakat. Memang benar jika dilihat dari jenis pemilunya, pemilu legislatif atau pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara programnya adalah dilihat dari isu-isu yang berkembang di wilayah tersebut dan berbeda-beda di tiap daerah. Seperti misalnya, pemilihan DPRD Tingkat II di kota Surabaya dapil 2, tentu berbeda kebutuhan isunya di dapil 3, oleh karena itu para kandidat caleg harus pintar mencari permasalahan yang

terjadi di wilayah tersebut jika ingin mengambil hati rakyat untuk memilihnya. Namun, visi-misi partai apalagi partai Islam yang menerapkan nilai-nilai keislaman tentu saja tidak dapat ditinggalkan demi alasan apapun.

Inilah yang kemudian sering dilupakan oleh para calon kandidat partai. Hampir keseluruhan kandidat partai Islam dalam melakukan “usaha” pemenangan pemilu melakukan Black Campaign atau kampanye hitam dengan memberikan bantuan baik berupa barang maupun uang tunai sebelum, selama, dan sesudah pemilu. Selain itu tidak diselenggarakannya janji-janji politik selama kampanye, Black Campaign, ketidakjujuran dan berkhianat turut memperburuk tingkah laku para kader partai Islam.. Padahal Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat jujur dalam setiap hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S 61:2-3 “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”

Ayat di atas, tampaknya dapat menjadi “cambukan” bagi para kader partai Islam yang mengaku mengamalkan ajaran Islam dalam setiap tindakan berpolitiknya, namun kenyataannya lalai karena telah terbuai dengan jabatan kekuasaan yang telah didapatkannya dan karena telah merasa “membeli suara” rakyat dengan “bantuan semmentaranya”. Fakta ini diakui oleh Husni Tamrin selaku wakil ketua DPW PPP Jawa Timur. “Pemilu di Indonesia sekarang ini rusak karena pada *jor-joran* (besar-besaran) uang tapi kualitas calegnya nol.” (Tamrin, *Wawancara*, 09 Desember 2014). Jika sudah demikian masihkah kesalahan terbesar tetap berada pada caleg? bagaimana dengan tanggung jawab partai Islam itu sendiri terhadap perkembangan kualitas kader ? dan bagaimana para partai Islam dalam merekrut caleg dari luar keanggotaan partai?

Beberapa pertanyaan di atas sebenarnya tidak akan menjadi suatu permasalahan jika benar partai Islam

menerapkan esensi dari sebuah partai (Surbakti, 1992 : 160) yaitu sebagai sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat bukan hanya sibuk mencari massa sebanyak-banyaknya agar partainya dapat lolos dalam *elementary threshold* (ambang batas) pemilu, sehingga mengesampingkan *feed back* (imbal balik) yang diberikan pada masyarakat, dan hanya untuk memperoleh kekuasaan politik. Walaupun kenyataan di lapangan, kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali menyimpang dari keinginan masyarakat. Ini dikarenakan partai Islam sekarang lebih memilih meninggalkan tipologi ideologi menjadi partai kepentingan, kekuasaan dan persaingan, sehingga tidak membedakannya antara partai Islam dan partai nasionalis.

Sebenarnya dalam menciptakan kader yang militan dan berintegritas, partai Islam telah menerapkan berbagai pelatihan pengkaderan, seperti di PAN misalnya terdapat tiga macam pelatihan perjenjangan kader, yakni : *Pertama*, LKD (Latihan Kader Dasar), *Kedua*, LKM (Latihan Kader Madya), dan *Ketiga*, LKP (Latihan Kader Paripurna). Serta telah dilakukan pembekalan caleg guna memperoleh kader yang berkapabilitas, seperti : pengenalan terhadap partai (PAN) sendiri (mengenai visi-misi, sistem pengkaderan, dll), teknis-teknis kampanye yang sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk di dalamnya diterapkan bagaimana cara mendapatkan massa terutama massa di luar PAN. Adapun setelah kader tersebut menjadi anggota legislatif, PAN tetap melakukan pengawasan dan jika suatu saat kader tersebut terbukti lalai dalam melakukan kewajibannya, partai sendiri yang akan memecat kader tersebut. (Kuswiyanto, *Wawancara*, 8 Januari 2015)

PKB juga memiliki cara tersendiri, diwakili oleh Fauzan Fuadi selaku Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB, menyatakan bahwa:

“Syarat utama seorang caleg adalah harus taat pada partai. Sebelum pemilihan berlangsung, caleg dari PKB dibekali dua kali

pembekalan, yaitu : pembekalan saat setelah diputuskan ia terdaftar sebagai caleg, dan pembekalan saat caleg tersebut terpilih menjadi anggota legislatif". (Fuadi, *Wawancara*, 23 Desember 2014)

PKS (Baihaqi, *Wawancara* 23 Desember 2014) mengaku dalam menciptakan kader yang berelektabilitas, telah dilakukan beberapa pembekalan kader bukan hanya kader yang akan maju sebagai kandidat pemilu tapi juga mereka (para kader partai) yang hanya ingin berproses di partai saja. Hal tersebut senada yang dilakukan di PPP dan PBB.

Sedangkan untuk memilih caleg dari luar yang hendak dijadikan caleg sebagai caleg non-partai ke-lima partai Islam mengaku tidak ada persyaratan khusus selain harus taat pada partai serta memenuhi tiga kriteria secara khusus, yakni : Figur (tokoh yang berkapasitas), maju dalam program-programnya, serta finansial yang mumpuni. Adapaun apakah ada syarat khusus dalam memilih caleg dari non-partai, ke-lima partai Islam di atas mengaku tidak ada, hanya saja menurut Shidiq Baihaqi selaku wakil dari PKS, Husni Tamrin selaku wakil dari PPP, dan Kuswiyanto selaku wakil dari PAN menyatakan bahwa yang namanya "shodaqoh politik" itu pasti ada tetapi tidak untuk masuk kantong pribadi anggota, melainkan untuk perkembangan organisasi (partai).

Melihat data yang diperoleh mengenai tanggung jawab partai Islam terhadap kualitas caleg/anggota partainya di atas sepertinya mustahil jika masih terdapat kader-kader partai Islam yang tidak berkompeten baik secara intelektual maupun secara akhlak. Menurut Din Saymsuddin (Syamsuddin, 2001 : 55-58) dalam bukunya yang berjudul "Islam dan Politik Era Orde Baru", ia menyatakan bahwa salah satu sebab merosotnya suara partai Islam di tiap pemilu adalah karena terjadinya apa yang disebut ambivalensi atau definisi mendua tentang umat Islam. Para pemimpin umat Islam mengkalim bahwa umat Islam mencapai sekitar 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia, tapi penggunaan mereka atas kata "umat

Islam” dalam konteks politik disini mereka artikan sebagai mereka yang secara formal menjadi anggota dan pendukung partai politik Islam, dengan demikian mereka mengesampingkan sejumlah orang yang menyatakan diri sebagai beragama Islam. Dengan demikian benar pendapat Shidiq Baihaqi, salah seorang narasumber dari PKS bahwa faktor partai Islam yang membatasi segmen, meskipun mereka (partai Islam) menyatakan diri sebagai partai terbuka namun tetap saja tidak mampu melebarkan sayap, dalam artian mendapatkan simpati massa dari kalangan non-Muslim. Ini dapat dikatakan mereka tidak mampu untuk *survive* dengan partai Islam mereka dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dengan berusaha untuk menutup diri dengan masyarakat minoritas Indonesia (Non-Muslim). Ini lah faktor utama mengapa partai Islam di Indonesia selalu kalah dengan partai nasionalis di pentas pemilu.

Penyebab Kanibalisme Politik

Kanibalisme Politik antar partai Islam kembali terjadi dalam pemilu 2014,. Partai Islam peserta pemilu 2014, yakni : PBB, PKS, PAN, PKB, dan PPP berusaha saling “mangsa-memangsa” dalam hal perolehan suara agar dapat bertahan dan menjadi pemenang di pemilu 2014, meski jika disandarkan pada pentas nasional, perolehan partai Islam masih kalah jauh jika dibandingkan dengan partai nasionalis, namun dengan perolehan suara yang didapat partai Islam tersebut cukup menjadi wakil suara umat Islam di parlemen. Perolehan suara di surabaya tersebut adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	Kursi DPRD I	Kursi DPRD II
PBB	1.174%	1.213%	2.352%	1.396%	1.135%	0	0
PKS	13.574%	13.554%	12.902%	14.613%	14.293%	6	5
PAN	13.401%	19.818%	12.279%	16.290%	12.115%	7	4

PPP	34.790%	9.272%	9.618%	5.694%	7.534%	5	1
PKB	28.443%	18.766%	25.769%	22.045%	24.718%	20	5

Sumber : KPU Surabaya

Sedangkan menurut perolehan suara secara nasional, hasil rekapitulasi KPU (Ramadhan, 2014) adalah sebagai berikut :

Nama Partai	Banyaknya Perolehan Suara	Prosentase (%)
NASDEM	8.402.812	6,72
PKB	11.298.957	9,04
PKS	8.480.204	6,79
PDI-P	23.681.471	18,95
GOLKAR	18.432.312	14,75
GERINDRA	14.760.371	11,81
DEMOKRAT	12.728.913	10,19
PAN	9.481.621	7,57
PPP	8.157.488	6,53
HANURA	6.579.498	5,26
PBB	1.825.750	1,46
PKPI	1.143.094	0,91

sumber : Rekapitulasi KPU

Kanibalisme (Suryakusuma, 2010: 157) dimaklumi sebagai bentuk kegilaan dan penyimpangan sosial. Terdapat dua jenis dari kanibalisme secara umum, yakni : endo-kanibalisme (memakan orang dari komunitas sendiri), dan ekso-kanibalisme

(memakan manusia dari masyarakat lain). Kanibalisme juga digunakan sebagai hiburan, ini biasanya dilakukan aktor sebagai akting di sebuah film. Sedangkan kanibalisme politik, yakni: apabila seorang manusia dalam negara baik aktor maupun non-aktor “memakan” orang mereka sendiri. Ini diekspresikan sebagai cara hubungan kekuasaan terhadap orang tersebut. Peristiwa kanibalisme politik ini berdasarkan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu : hubungan sosial yang melibatkan intrik dengan tujuan mendapatkan otoritas atau kekuasaan. Lebih khusus, selain istilah kanibalisme politik, terdapat istilah lain, yakni kanibalisme caleg. Ini diutarakan oleh Sudiyatmiko Ariwibowo, seorang kuasa hukum dari PDIP untuk KPU dalam pemilu presiden 2014 kemarin, menyatakan bahwa: kanibalisme caleg merupakan Praktek pencurian suara antar caleg di dalam satu partai. (Ariwibowo, Wawancara, 2014)

Semua seakan dapat dihalalkan dalam politik guna didapatkannya jabatan atau kekuasaan politik. Bahkan dengan memakan suara saudara sesama partai Islam sendiri dianggap sah bagi dunia perpolitikan. Padahal jika dilihat secara perolehan suara dalam tabel di atas, khususnya dalam perolehan suara nasional, musuh terbesar partai Islam yang sebenarnya adalah bukan dari antar partai Islam tetapi justru dengan partai nasionalis. Bagaimana tidak, perolehan PKB yang berhasil meraih posisi lima besar mewakili partai Islam pun masih tertinggal dengan demokrat yang meraih suara 10,18%, apalagi dengan PDI-P yang memperoleh suara 19,85%, sangat jauh tertinggal.

Namun bukan berarti partai-partai Islam tidak menyadari hal tersebut, ke-lima partai Islam menyadari bahwa sebenarnya musuh terbesar dalam pemilu adalah partai nasionalis.

Menurut Shidiq Baihaqi (PKS), “kanibalisme politik terjadi bukan hanya antar partai Islam tapi justru antar partai Islam dan nasionalis. Karena adanya istilah *bolo dewe, konco dewe*,

tonggo dewe, bisa saja PKS saling memangsa suara dengan Golkar, PDI-P, begitupun sebaliknya” (Baihaqi, *Wawancara*, 23 Desember 2014)

Senada dengan PKS, Kuswiyanto (PAN) menyatakan bahwa :

“untuk kanibalisme politik di DPRD tingkat I dan II, mangsa memangsa suara antar basis massa yang sama tidak selamanya, karena jika hanya mengandalkan basis utama maka PAN tidak akan besar. Oleh karena itu, saling mangsa memangsa antar partai nasionalis bisa saja terjadi, lebih kepada perseorangan atau profile caleg masing-masing. Sebagai contohnya adalah seperti yang terjadi di Dapil 4 , Chusnul Khotimah adalah caleg dari PDI-P yang berhasil mengalahkan PAN”. (Kuswiyanto, *Wawancara*, 8 Januari 2015)

Badrut Tamam (PKB) yang notabene berbasis massa ormas (organisasi masa) NU juga menegaskan bahwa:

“kalau menurut saya malah yang paling berpengaruh itu ya psikologi pemilihnya masing-masing, karena pemilih Indonesia sekarang jarang sekali yang melihat dari visi-misi, kebanyakan mereka memilih karena adanya imbalan dari para caleg tersebut. Jadi sangat bisa yang dimangsa suaranya itu bukan hanya dari PPP yang basisnya NU, tapi juga bisa dari semua kalangan partai baik Islam maupun nasionalis”. (Tamam, *Wawancara*, 23 Desember 2014)

Mengenai kanibalisme politik antar PPP dan PKB, jika PKB terlihat lebih santai, namun tidak dengan PPP. PPP mengakui dengan gamblang bahwa memang kanibalisme politik yang terjadi antara dirinya (PPP) dengan PKB memang benar terjadi adanya. Amar menyatakan “Itu masih dengan partai sesama Islam, kami kalah, apalagi dengan partai yang nasionalis, malah kami jauh tertinggal karena sistem, program, dan figur yang dimiliki partai nasionalis jauh lebih baik dari PPP.” (Amar, *Wawancara*, 16 Januari 2015)

PBB yang memang sejarah kelahirannya tidak terpaku pada satu ormas pendukung, melainkan dari gabungan

organisasi-organisasi mengaku bahwa jaminan untuk partai yang memiliki satu basis massa untuk selalu mendukung suatu partai, tidak selamanya berlaku demikian, Askhabul Mukminin menyatakan bahwa: “Konfigurasi ormas pendukung tidak selamanya dapat dipastikan akan mendukung, oleh karena itu bisa saja bukan hanya basis massa yang menjadi musuh, tetapi juga para partai nasionalis, justru merekalah musuh yang terbesar”. (Mukminin, *Wawancara*, 6 Desember 2014)

Dengan demikian selain faktor kesamaan basis massa tradisional seperti pendapat Saiful Mujani, penyebab terjadinya fenomena kanibalisme politik adalah :

1. Faktor perilaku pemilih. Dalam hal ini perilaku pemilih juga menentukan mengapa kanibalisme politik terjadi. Mayoritas pemilih masyarakat Indonesia kini lebih memilih kandidat partai yang memberikan “shodaqoh politik” terhadapnya. Perilaku pemilih seperti ini menurut Muhammad Asfar (Asfar, 2006: 137-144) disebut dengan pemilih rasional. Pemilih rasional sendiri menurut Niemi dan Wiesberg adalah perilaku memilih berdasarkan pada pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil, yang terpenting adalah mendahulukan keselamatan. Dengan begitu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, menilai calon kandidat yang ditampilkan. Penilaian rasional ini didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi dibidang masing-masing seperti: seni, olah raga, film, dll. Meskipun pemilih sosiologis (pemilih yang berdasarkan karakteristik sosial, seperti : agama, suku, wilayah, jenis kelamin, dsb), serta pemilih psikologis (berdasarkan lingkungan pemilih) tetap berpengaruh, namun pemilih secara rasional atau pragmatis lebih dominan dewasa ini.

2. Berbeda wilayah berbeda pula program yang ditawarkan. Seperti yang telah dijelaskan diawal, bahwa dalam pemilu DPRD tingkat I dan II, wilayah merupakan kekuatan yang tidak bisa disepelekan, para kandidat harus pandai-pandai mencari isu yang berkembang di suatu wilayah tersebut, karena jika ia gagal mencari isu yang sesuai keinginan rakyat, tentu ini menjadi kesempatan bagi lawan partai untuk merebut suara dalam pemilu tersebut, dan disinilah banyak terjadi fenomena kanibalisme politik.
3. Tidak jelasnya asas partai. Ini terjadi khususnya pada PPP, PBB, dan PKS. ketiga partai Islam ini mengaku bahwa dirinya merupakan partai Islam, namun entah mereka lupa atau bagaimana, bahwa mereka sedang mendirikan partai Islam di Indonesia, sebuah negara yang pluralis agama. Dengan demikian keteguhannya untuk tidak menerima anggota yang bukan non-Muslim tentu membuat mereka mustahil untuk mendapatkan suara yang besar ditiap pemilu, dan ini menjadi kesempatan bagi lawan partai, seperti PAN untuk PKS dan PBB, dan PKB untuk PPP untuk mengambil suara PBB, PKS, dan PPP yang non-Muslim.

Namun dari ketiga faktor penyebab fenomena kanibalisme politik antar partai Islam di atas, faktor yang paling menentukan adalah tetap kesamaan basis massa tradisional partai-partai Islam, karena dari massa tradisional inilah partai Islam memperoleh suara terbesar dan ini menjadi *the loyal voters* (pemilih setia) yang harus mereka jaga agar tidak kemudian berpindah haluan.

Penutup

Penyebab fenomena kanibalisme politik secara garis besar terdapat tiga faktor, yaitu: faktor kesamaan basis massa tradisional yang dimiliki masing-masing partai Islam, faktor perilaku pemilih yang didominasi oleh pemilih rasional, yakni pemilih yang berdasarkan yang paling menguntungkan atau

mendatangkan kerugian yang paling sedikit (berdasarkan untung-rugi), faktor perbedaan program di tiap wilayah pemilu, dimana berbeda pemilu dan wilayah tentu memiliki program yang berbeda. sehingga jika partai Islam tidak pandai mencari isu, maka akan diambil oleh lawan politiknya, serta faktor yang terakhir adalah tidak jelasnya asas yang dimiliki partai Islam, sehingga memudahkan lawan untuk mengambil suara yang seharusnya dapat diperolehnya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar perolehan suara partai islam dapat meningkat dan kanibalisme antar partai Islam dapat sedikit ditekan, sehingga dapat bersaing dengan partai nasionalis, antara lain:

1. Perlunya melebarkan sayap bagi partai Islam agar meskipun secara *de facto* menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Islam, namun tetap membuka diri untuk menerima anggota dari kalangan non-Muslim guna mengembangkan basis massanya, tentu saja dengan tetap menerapkan nilai-nilai keislaman dalam setiap perilaku politiknya .
2. Meningkatkan kualitas integritas para kader, agar meskipun memiliki kesamaan basis massa namun para pemilih (masyarakat sadar bahwa suatu partai tersebut memiliki kekhasan yang lain dari partai lainnya meskipun sama dalam basis massa). Tentu saja dengan tetap memperbaiki sistem partai.

Daftar Rujukan

- Amar, Ichlasul. 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Jogjakarta : Tiara Wacana
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya : Pustaka Eureka
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT . Gramedia Widisuasarana
- Suryakusuma, Julia. 2010. *Jihad Julia : Pemikiran Kritis dan Jenaka Feminis Pertama di Indonesia*, Bandung : Qanita
- Syamsuddin, Din. 2001. *Islam dan Politik*. PT Logos Wacana Ilmu : Jakarta

- Destri, Soestriawan. "Partai-Partai Islam dalam Pemilu 1999, Studi Kebijakan Presiden BJ. Habibie tentang Multi Partai". Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)
- Diamond. "Teori Politik dan Ideologi Demokrasi". Jurnal : Teori Politik dan Ideologi Demokrasi Vol. 10. No.1 (April, 2013)
- Sudarno, Shobron. 2013. "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia". Jurnal : Studi Islam Vol.14. No. 1 (Juni, 2013)
- Amich Al-Humami, <http://www.suararakyat.co/2014/03/korupsi-dan-kanibalisme-politik.html> "Korupsi dan Kanibalisme Politik"(30 November 2014)
- BilalRamadhan,<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/10/n5bgv5-ini-hasil-lengkap-rekapitulasi-perolehan-suara-pileg-2014> "Ini Hasil Lengkap Perolehan Suara Pileg 2014"(26 Januari 2015)
- Biyanto. 2014. "Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam". *Jawa Pos* Edisi 15 September 2014. Surabaya
- Rahmat, <https://gardarahmat010.wordpress.com/artikel/> "Hubungan antara PKB dan NU" (18 Januari 2015)
- Relaswati. 2010. "Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai Politik Islam pada Pemilu Legislative 2009 di DKI Jakarta". Jurnal : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Vol.9 No.34 (April-Juni2010)
- Sudiyatmiko
Ariwibowo,<http://www.rumahpemilu.org/in/read/7506/Sudiyatmiko-AriwibowoKanibalisme-Caleg-Disebabkan-Pengawasan-yang-Lemah.html> "Kanibalisme Caleg Disebabkan Pengawasan yang Lemah" (24 Desember 2014)
- KPU, Pemalang, <https://kpupemalang.wordpress.com/2011/05/05/partai-politik-baru/#more-923> "Partai Politik Baru" (08 Oktober 2014)
- Wikipedia,http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1955 "Pemilihan Umum Legislatif 1955" (08 Oktober 2014)
- Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen "Ambang Batas Parlemen" (08 Oktober 2014)
- Amar, Wawancara, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 16 Januari 2015
- Akshabul Mukminin, Wawancara, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014
- Badrut Tamam, Wawancara, Lobby Empire Palace Surabaya, 23 Desember 2014
- Fauzan Fuadi, Wawancara, Lobby Empire Palace Surabaya, 23 Desember 2014

- Husni Tamrin, Wawancara, Kantor DPW PPP Jawa Timur, 09 Desember 2014
- Kuswiyanto, Wawancara, Kantor DPW PAN Jawa Timur, 08 Januari 2015
- Rahmat Wahyudi, Wawancara, Kantor DPW PKS Jawa Timur, 23 Desember 2014
- Rizal Aminuddin, Wawancara, Kantor DPW PBB Jawa Timur, 06 Desember 2014
- R. Suwasis Hadi, Wawancara, Kantor DPW PAN Jawa Timur, 08 Januari 2015
- Shidiq Baihaqi, Wawancara, Kantor DPW PKS Surabaya, 23 Desember 2014